

***Framing* Model Gamson dan Modigliani pada Pemberitaan Kasus Korupsi PT Timah 2024 di Kompas.com dan Tempo.co**

Aditya Angga Yulianto^{1*}, Afdal Makkuraga Putra¹, Ponco Budi Sulistyo¹

¹Universitas Mercu Buana Jakarta
Jl. Meruya Selatan No.1, Joglo, Jakarta 11650 - Indonesia.
*Corresponding author: adityaangga750@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.25008/jpi.v7i2.222>

Submitted: July 24, 2025; Revised: August 5, 2025; Published: October 10, 2025

Abstract

Corruption in Indonesia remains a structural issue that undermines governance and erodes public trust. One of the country's biggest corruption scandals in 2024 was the PT Timah case, which caused state losses of up to IDR 271 trillion. This study aims to compare how two major Indonesian online news portals, Kompas.com and Tempo.co, constructed their news coverage of the case using the framing analysis model by Gamson and Modigliani. The research employs a qualitative approach with a constructivist paradigm and text analysis technique. The data consist of 10 purposively selected news articles published between March and December 2024, five from each portal. The analysis found that the dominant frame in both media is corruption as a matter of law and justice. Kompas.com focuses on legal processes such as asset seizures, arrests, and court proceedings, while Tempo.co emphasizes systemic dimensions such as the scale of state losses and light court verdicts. In the frame of corruption as a societal and environmental impact, Kompas.com highlights the socioeconomic consequences, while Tempo.co underscores the ecological destruction and loss of life caused by illegal mining. These differences reflect each outlet's editorial orientation. The findings confirm that media actively shape public perceptions of corruption not merely by presenting facts, but by constructing meaning. This study contributes to the field of political communication and media studies by offering insights into how media framing influences public understanding of strategic governance issues, particularly in the management of natural resources.

Keywords: Public Perception, Media Analysis, Corruption Issues, Construction of Meaning, Editorial Orientation

Abstrak

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang melemahkan tata kelola pemerintahan dan menggerus kepercayaan publik. Salah satu kasus besar pada tahun 2024 adalah skandal korupsi PT Timah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp271 triliun. Penelitian ini bertujuan membandingkan konstruksi pemberitaan kasus tersebut dalam dua portal berita nasional, Kompas.com dan Tempo.co, dengan menggunakan model analisis *framing* Gamson dan Modigliani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivisme, dan teknik analisis teks. Data terdiri dari 10 berita hasil seleksi purposif yang diterbitkan antara Maret hingga Desember 2024, masing-masing lima dari Kompas.com dan Tempo.co. Analisis menemukan bahwa *framing* dominan dalam kedua media adalah korupsi sebagai persoalan hukum dan keadilan. Kompas.com menekankan aspek proses hukum seperti penyitaan aset, penahanan tersangka, dan jalannya persidangan. Tempo.co lebih menyoroti dimensi sistemik, seperti skala kerugian negara dan lemahnya vonis pengadilan. Dalam *framing* korupsi sebagai dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, Kompas.com lebih fokus pada

dampak sosial-ekonomi, sementara Tempo.co menggarisbawahi kehancuran ekologis dan korban jiwa akibat tambang ilegal. Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya orientasi redaksional yang khas dari masing-masing media. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa media berperan aktif dalam membentuk persepsi publik atas isu korupsi, tidak hanya melalui fakta, tetapi melalui konstruksi makna. Studi ini memberikan kontribusi pada kajian komunikasi politik dan media, khususnya dalam memahami dinamika *framing* atas isu-isu strategis dalam tata kelola sumber daya alam.

Kata Kunci: Persepsi Publik, Analisis media, Isu Korupsi, Konstruksi Makna, Orientasi Redaksi

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan kronis yang terus menghantui Indonesia. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun swasta. Pada awal tahun 2024, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Timah, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di sektor pertambangan. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Bangka Belitung, daerah yang kaya akan sumber daya timah namun mengalami berbagai persoalan tata kelola dan kesejahteraan.

Menurut laporan Alinda Hardiantoro (2024) di Kompas.com, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 271,06 triliun, dengan rincian kerusakan hutan sebesar Rp 223,36 triliun dan kerusakan di luar kawasan hutan sebesar Rp 47,70 triliun. Di sisi lain, Tempo.co (Adil Al Hasan, 2024) menyoroti dampak ekologis yang signifikan, seperti hilangnya sekitar 460 ribu hektar hutan tropis serta meningkatnya kecelakaan tambang yang menimbulkan korban jiwa.

Fenomena ini memperlihatkan apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam (*resource curse*), di mana kekayaan alam justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aisyah Tjahja, 2023). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023) menunjukkan bahwa provinsi ini masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan pedesaan tertinggi, dengan pendapatan per kapita hanya Rp 893,38 ribu per bulan. Dalam sektor pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di provinsi ini hanya 18,19 persen—terendah di

Indonesia—dan memiliki tingkat putus sekolah jenjang SMA tertinggi sebesar 3,62 persen.

Kasus dugaan korupsi di PT Timah bukanlah kasus pertama di sektor pertambangan. Namun, nilai kerugian yang besar serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan membuat kasus ini menjadi salah satu yang paling mencolok. Studi Faiqoh Nur Azizah (2022) menyebutkan bahwa korupsi di sektor pertambangan kerap dipicu oleh tumpang tindih regulasi dan rendahnya integritas pejabat publik. Temuan serupa diungkap oleh La Husen Zuada (2023) dalam kasus korupsi nikel di Sulawesi Tengah, yang memperlihatkan adanya keterlibatan lintas aktor mulai dari pengusaha, politisi, hingga aparat hukum.

Dalam konteks ini, media massa memiliki peran penting sebagai aktor pengawas (*watchdog*) yang mampu mengungkap dan membentuk opini publik terhadap kasus-kasus korupsi. Namun, media tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membingkai (*framing*) realitas sesuai sudut pandang tertentu. Menurut Gamson dan Modigliani yang dikutip oleh Muliani (2024), *framing* merupakan proses konstruksi realitas melalui paket interpretatif (*interpretative packages*) yang terdiri atas elemen *framing devices* dan penalaran (*reasoning devices*).

Setiap media memiliki kebijakan redaksional, gaya jurnalistik, dan orientasi ideologis yang dapat memengaruhi cara mereka membingkai suatu isu. Octama (2001) dalam Intan Leliana (2021) menjelaskan bahwa media dapat menyampaikan makna yang berbeda atas isu yang sama, tergantung pada bagaimana mereka memilih sudut pandang, gaya

penulisan, dan elemen yang dianggap penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dua media daring nasional, Kompas.com dan Tempo.co, membongkai kasus korupsi PT Timah tahun 2024. Kompas.com dikenal memiliki pendekatan moderat dan berimbang, sedangkan Tempo.co memiliki gaya jurnalistik investigatif yang cenderung kritis. Dalam laporan *Digital News Report 2023* dari Reuters Institute, Kompas.com dinobatkan sebagai media daring paling dipercaya di Indonesia, sedangkan Tempo.co berada di peringkat ketujuh (Cindy Mutia Annur, 2023)

Kedua media ini dipilih karena representatif dalam menunjukkan keragaman pendekatan jurnalistik di Indonesia. Dengan menggunakan model analisis *framing* Gamson dan Modigliani, penelitian ini mencoba membandingkan konstruksi makna yang dibentuk oleh Kompas.com dan Tempo.co dalam memberitakan skandal korupsi PT Timah. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap isu korupsi yang kompleks, serta bagaimana *framing* media dapat mencerminkan kecenderungan ideologis dan pengaruh institusional yang melekat pada media tersebut.

Kerangka Teori

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk realitas sosial melalui produksi dan penyebaran informasi. Dalam konteks ini, media tidak hanya bertugas merefleksikan kenyataan, tetapi juga aktif dalam mengonstruksi realitas sosial melalui seleksi fakta, narasi, dan pembingkai berita (Parulian Sitompul, 2014). Oleh karena itu, dalam menelusuri bagaimana media membongkai sebuah peristiwa, penting untuk memahami teori-teori komunikasi yang relevan, khususnya teori konstruksi sosial, agenda setting, dan *framing*.

Pertama, teori konstruksi realitas sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menekankan

bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi manusia dan institusi, termasuk media. Dalam konteks media, konstruksi realitas berlangsung melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi atas peristiwa-peristiwa yang dilaporkan (Ferry Adhi Dharma, 2018). Namun, teori ini kemudian diperbarui oleh Burhan Bungin yang menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi informasi, dengan menekankan bahwa media massa, khususnya media online, memiliki kecepatan dan jangkauan yang mampu mempercepat proses konstruksi realitas secara luas (Zakaria Siregar, 2018). Realitas sosial yang dibentuk oleh media dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap isu-isu tertentu, termasuk isu korupsi di sektor pertambangan.

Kedua, teori *agenda setting* yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi prioritas isu di benak publik (Maxwell E. McCombs, 2014). Artinya, semakin besar intensitas pemberitaan sebuah isu, maka semakin tinggi pula kemungkinan isu tersebut dianggap penting oleh khalayak (Erwan Efendi, 2023). Dalam kasus korupsi PT Timah, teori ini menjelaskan bagaimana media, melalui frekuensi dan penonjolan isu, berperan dalam membentuk opini publik tentang pentingnya kasus tersebut.

Ketiga, teori *framing*, khususnya model yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani, menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Model ini melihat bahwa sebuah isu dalam media dikonstruksi melalui apa yang disebut sebagai *interpretative package*, yaitu kumpulan gagasan, simbol, dan narasi yang digunakan untuk membongkai isu agar memiliki makna tertentu (Kartina Hardiyani, 2023). Model ini terdiri dari dua komponen penting: *framing devices* dan *reasoning devices*. *Framing devices* meliputi penggunaan metafora, jargon, kutipan tokoh, penggambaran visual, dan narasi yang digunakan untuk membongkai peristiwa. Sementara itu, *reasoning devices* merujuk pada penyebab masalah (*roots*), prinsip

moral (*appeals to principle*), dan konsekuensi dari isu yang diberitakan (*consequences*) (Khoerunnisa Eka Pratiwi, 2021).

Dengan menggunakan model *framing* Gamson dan Modigliani, penelitian ini mengkaji bagaimana dua media daring besar, yaitu Kompas.com dan Tempo.co, mengonstruksi pemberitaan mengenai kasus korupsi PT Timah. Keduanya dipilih karena mewakili dua pendekatan jurnalistik yang berbeda: Kompas.com dengan gaya moderat dan berimbang, serta Tempo.co yang dikenal kritis dan investigatif. Perbedaan pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya terhadap bagaimana isu yang sama dapat dibingkai secara berbeda oleh dua media.

Selain itu, keberadaan media online sebagai objek analisis menambah dimensi baru dalam kajian komunikasi, karena karakteristiknya yang *real-time*, interaktif, dan memiliki jangkauan luas (Julius Manahara Hutabarat, 2024). Media online memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan dapat menjangkau khalayak yang lebih besar. Dalam konteks pemberitaan kasus korupsi, hal ini menjadi penting karena media online tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk wacana publik secara dinamis.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial, agenda *setting*, dan *framing* menjadi fondasi utama dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana media daring di Indonesia membentuk persepsi publik terhadap kasus korupsi besar di sektor pertambangan melalui strategi pemberitaan dan konstruksi makna yang mereka bangun.

Metode Penelitian

Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi sosial (Warul Walidin, 2015). Dalam konteks ini, media massa dipahami tidak sekadar merefleksikan realitas, melainkan membentuknya melalui proses seleksi, narasi, dan pembingkai informasi (Annisa Tishana, 2023). Oleh karena itu, realitas media—terutama dalam

pemberitaan kasus korupsi PT Timah—dipandang sebagai konstruksi yang dikembangkan berdasarkan kebijakan redaksional dan sudut pandang ideologis masing-masing media.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis *framing* model Gamson dan Modigliani. Metode ini memungkinkan pengungkapan makna yang tersembunyi dalam teks berita, serta interpretasi naratif yang dibangun media dalam menyampaikan isu korupsi. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan prinsip paradigma konstruktivisme, yang memandang pemberitaan sebagai bentuk narasi dan interpretasi realitas sosial.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita daring dari Kompas.com dan Tempo.co yang secara khusus membahas kasus dugaan korupsi PT Timah tahun 2024. Total berita yang dianalisis adalah 10 artikel: masing-masing lima berita dari kedua media yang dipilih secara purposif berdasarkan keberpihakan isu, kedalaman narasi, dan keragaman *angle* pemberitaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran arsip digital dengan kata kunci seperti “korupsi PT Timah”, “tambang ilegal”, dan “kerugian negara PT Timah”. Artikel yang relevan diunduh dalam rentang waktu Maret–Desember 2024, dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi, frekuensi, dan sudut pandang pemberitaan. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur akademik lainnya untuk memperkaya konteks analisis.

Penelitian ini menggunakan model *framing* Gamson dan Modigliani, yang membagi perangkat analisis menjadi dua kategori: (1) *Framing Devices: metafora, catchphrases, exemplar, dan depiction*. Visual image tidak digunakan dalam penelitian ini; (2) *Reasoning Devices: roots (sebab-akibat), appeals to principle (klaim moral), dan consequences (dampak)*.

Artikel dianalisis melalui tiga tahap: (1) *Coding*: Berita dikelompokkan dalam tiga paket interpretatif (*packages*): Korupsi sebagai persoalan hukum dan keadilan, dan

korupsi sebagai dampak buruk bagi lingkungan dan Masyarakat; (2) Tabulasi: Penyusunan data ke dalam tabel berdasarkan perangkat *framing*; (3) Interpretasi: Menafsirkan temuan berdasarkan relasi antar elemen *framing*.

Validitas data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari Kompas.com dan Tempo.co. Hal ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas dan transferabilitas temuan, sejalan dengan prinsip *trustworthiness* dan *authenticity* dalam paradigma konstruktivisme.

Penelitian ini membatasi fokus pada realitas media dan narasi pemberitaan seputar kasus korupsi PT Timah dalam ranah media agenda. Dimensi agenda publik dan agenda kebijakan tidak dianalisis karena memerlukan pendekatan survei dan metode kuantitatif. Selain itu, analisis visual

tidak dilakukan untuk menjaga konsistensi pendekatan teks dan menghindari bias interpretasi semiotik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis bagaimana media daring Kompas.com dan Tempo.co membingkai kasus korupsi PT Timah tahun 2024 melalui perangkat *framing* yang ditawarkan oleh Gamson dan Modigliani. Penelitian difokuskan pada tiga paket interpretatif utama (*interpretative packages*), yaitu: (1) Korupsi sebagai persoalan hukum dan keadilan; (2) Korupsi sebagai dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Dari total 10 artikel yang dianalisis (lima dari Kompas.com dan lima dari Tempo.co), masing-masing artikel diklasifikasikan sesuai dengan kerangka interpretasi yang dominan.

Table 1. Klasifikasi Paket *Framing* Pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co

Media	Hukum dan Keadilan	Dampak Buruk Lingkungan dan Masyarakat	Total
Kompas.com	3	2	5
Tempo.co	4	1	5

Sumber: Data primer hasil analisis teks berita, 2024

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Tempo.co lebih dominan membingkai kasus korupsi PT Timah sebagai persoalan hukum dan keadilan, dengan empat dari lima berita mengangkat aspek penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan konsistensi Tempo.co dalam menyampaikan narasi hukum yang kuat atas skandal ini.

Sementara itu, Kompas.com menampilkan pola *framing* yang lebih seimbang, dengan tiga berita dalam bingkai hukum dan keadilan serta dua berita yang menyoroti dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Kompas.com tidak hanya fokus pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekologis dari kasus ini.

Kedua media sama-sama menyentuh isu kerusakan lingkungan dan dampak sosial, meskipun Tempo.co hanya satu kali mengangkat aspek ini, sedangkan Kompas.com lebih banyak mengaitkan kasus ini dengan penderitaan masyarakat dan kerusakan akibat tambang ilegal.

Secara umum, Tempo.co tampil konsisten dengan narasi hukum, sedangkan Kompas.com memberikan ruang yang lebih luas untuk menggambarkan dampak sosial dan lingkungan.

Adapun jenis berita yang terdapat pada media Kompas.com dan Tempo.co umumnya berupa *straight news*. Berita *straight news* merupakan berita langsung, yang memiliki arti di mana suatu berita yang singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja yang mengandung unsur 5W + 1H (*who, what, where, when, why, dan how*) pada paragraf awal (alinea

pertama hingga alinea kedua) terhadap suatu peristiwa yang diberitakan.

Berita jenis ini sangat terikat waktu (*deadline*) karena informasinya sangat cepat basi jika terlambat disampaikan kepada audiens. Sehingga tidak semua komponen *framing* Gamson dan Modigliani dapat ditemukan secara lengkap dalam setiap berita yang disajikan. Sebagai contoh, sebuah berita memiliki *depiction* namun tidak memiliki *metaphors*, atau sebuah berita memiliki *roots* namun tidak memiliki *consequences*. Hal ini sangat berlainan dengan jenis *indepth news* yang biasanya menyajikan berita secara lebih menyeluruh dan lengkap sehingga semua komponen *framing* dapat ditemukan.

Framing Berita di Kompas.com

Berita pertama yang dianalisis dalam kategori ini adalah artikel berjudul “*Kejagung Sita Uang Rp 10 Miliar dan 2 Juta Dollar Singapura Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah*” yang dimuat oleh Kompas.com. Berita ini merepresentasikan pendekatan *framing* yang kuat dalam menyoroti dimensi hukum dari kasus korupsi PT Timah.

Penggunaan *framing devices* dalam artikel ini cukup menonjol. Salah satu yang utama adalah *metaphor* berupa istilah “perusahaan boneka”, yang merujuk pada entitas bisnis seperti CV Mega Belitung, CV Sumber Energi Perkasa, dan CV Mutiara Jaya Perkasa yang tidak beroperasi secara independen, melainkan digunakan sebagai alat untuk kegiatan ilegal seperti korupsi dan pencucian uang. Istilah ini tidak hanya menyampaikan makna denotatif, tetapi juga membentuk opini publik bahwa tindakan tersebut bersifat manipulatif dan tersembunyi.

Selain itu, digunakan juga *catchphrase* berupa angka yang mencolok — “Rp 10 miliar dan 2 juta dollar Singapura” — dalam judul dan isi berita. Penggunaan angka ini tidak hanya menarik perhatian pembaca, tetapi juga membangun narasi tentang besarnya kerugian negara.

Berita ini juga menampilkan *exemplar*, yakni contoh konkret dari proses

penyitaan seperti “barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai”. Penyebutan rinci ini memperkuat kredibilitas berita dan menjelaskan proses hukum yang sedang berlangsung secara faktual.

Untuk *depiction*, frasa seperti “uang tunai yang disita diduga hasil kejahatan” memberikan penekanan konotatif bahwa dana tersebut adalah hasil tindak pidana. Kalimat ini mengarahkan pembaca untuk memandang penyitaan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang sah.

Dalam kerangka *reasoning devices*, berita ini menyertakan *roots* yang menjelaskan hubungan sebab-akibat bahwa penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan bukti dalam proses hukum. Sedangkan *consequences* juga ditampilkan melalui narasi bahwa penyitaan tersebut akan memperkuat posisi penyidik dalam mengungkap dan memproses pelaku korupsi. Namun, tidak ditemukan *appeals to principle* secara eksplisit yang menunjukkan klaim moral atau seruan etis.

Melalui penggunaan perangkat *framing* ini, Kompas.com menegaskan bahwa kasus ini merupakan isu hukum yang serius. Narasi yang dibangun bersifat legal-formal, dengan penekanan pada proses hukum dan tindakan lembaga negara (Kejaksaan Agung), bukan pada aspek moralitas atau politik. Ini menunjukkan kecenderungan Kompas.com untuk mbingkai isu korupsi dalam kerangka penegakan hukum yang objektif dan sistematis.

Berita kedua yang dianalisis berjudul “*Bos Smelter Timah Swasta Setor Dana CSR Rp 122 Miliar untuk Harvey Moeis*” yang diterbitkan oleh Kompas.com. Artikel ini menyoroti dugaan penyalahgunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terkait erat dengan skandal korupsi timah tahun 2024. Pemberitaan ini memperluas spektrum korupsi tidak hanya pada penyalahgunaan izin tambang, tetapi juga pada manipulasi dana sosial perusahaan demi kepentingan pribadi oknum elite.

Kompas.com dalam berita ini memanfaatkan berbagai *framing devices* untuk membentuk persepsi publik. Salah satu perangkat yang paling menonjol adalah penggunaan *catchphrase* berupa angka mencolok “Rp 122 miliar”. Pengulangan angka ini dalam judul dan isi artikel berfungsi untuk menekankan besarnya nominal dana CSR yang diselewengkan, yang pada dasarnya seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, artikel ini menyertakan *exemplars* yang mengilustrasikan secara konkret bagaimana dana CSR tersebut dialirkan dan kemudian diduga dimanfaatkan oleh individu tertentu, seperti Harvey Moeis dan Helena Lim. Dengan menyertakan detail ini, berita tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memperkuat narasi penyimpangan sistemik yang terjadi dalam pengelolaan dana CSR.

Pada level *depiction*, Kompas.com menyampaikan kutipan langsung dari pihak Kejaksaan yang menyatakan bahwa dana CSR digunakan untuk memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim. Narasi ini berfungsi membangun citra negatif atas tindakan mereka, dengan kesan moral bahwa penyalahgunaan dana sosial merupakan bentuk korupsi yang lebih memprihatinkan karena merugikan masyarakat luas.

Dalam kerangka *reasoning devices*, berita ini menampilkan *roots* dengan menggambarkan pola hubungan sebab-akibat yang menjelaskan bahwa skema korupsi terjadi akibat kolusi antara pejabat PT Timah dan pihak swasta. Hal ini tidak hanya memperlihatkan adanya tindakan individu, tetapi juga mencerminkan struktur sistemik yang memungkinkan terjadinya korupsi berlapis dalam sektor ekstraktif.

Kompas.com juga menampilkan *consequences* berupa kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut, baik terhadap keuangan negara maupun terhadap lingkungan hidup, dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Hal ini memberikan gambaran luas mengenai dampak destruktif dari korupsi yang tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga ekologis dan sosial.

Secara keseluruhan, pemberitaan ini membongkai kasus sebagai bentuk korupsi berlapis yang melibatkan manipulasi dana publik dan menunjukkan bahwa kejahatan tersebut memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar penyimpangan prosedural. Dengan menekankan besaran dana yang diselewengkan dan aktor-aktor penting di balik kasus, Kompas.com menegaskan bahwa ini adalah persoalan serius dalam ranah hukum dan tata kelola korporasi.

Berita ketiga yang dianalisis berjudul “Kritik Vonis Ringan Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Rp 300 Triliun, Mahfud MD: Menusuk Rasa Keadilan” yang diterbitkan oleh Kompas.com. Artikel ini memfokuskan perhatiannya pada reaksi publik, khususnya dari tokoh nasional Mahfud MD, terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, yang dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan besarnya kerugian negara akibat korupsi timah.

Dalam konstruksi beritanya, Kompas.com menggunakan berbagai *framing devices* untuk membangun narasi ketimpangan antara kejahatan besar dan hukuman yang dijatuhkan. Pada elemen *catchphrases*, digunakan frasa mencolok seperti “vonis ringan” dan “Rp 300 triliun” untuk menciptakan kontras antara hukuman yang minim dan kerugian negara yang sangat besar. Frasa ini berfungsi sebagai penanda ketidakpuasan moral dan hukum, serta menggiring opini pembaca terhadap urgensi perlunya hukuman yang lebih berat.

Penggunaan *exemplars* sangat menonjol dalam berita ini. Kompas.com mengutip langsung kritik Mahfud MD yang menyatakan bahwa vonis tersebut sangat tidak adil. Pernyataan seperti “uang pengganti yang dibebankan hanya sekitar 0,07 persen dari total kerugian negara” dan “tidak sampai setengah persen” merupakan contoh konkret yang memperjelas ketimpangan dalam proses peradilan. Kritik ini memberikan bobot pada gagasan bahwa

sistem hukum gagal memberikan keadilan substantif dalam kasus mega korupsi.

Untuk aspek *depictions*, Kompas.com menggunakan frasa berkonotasi seperti “*vonis yang menusuk rasa keadilan*”, yang menggambarkan keputusan tersebut sebagai sesuatu yang menyakitkan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penggambaran ini bersifat afektif dan memberikan penekanan emosional terhadap ketidakadilan dalam keputusan hukum.

Pada *reasoning devices*, berita ini menampilkan *roots* dengan menjelaskan bahwa kasus korupsi timah merupakan hasil dari kolusi antara pejabat BUMN dan pihak swasta. Hal ini menyoroti latar belakang sistemik dari korupsi tersebut dan memperlihatkan bahwa hukuman yang ringan dapat melemahkan upaya pembenahan struktural di sektor pertambangan dan hukum.

Selain itu, terdapat penggunaan *appeals to principle* berupa klaim moral seperti “keadilan harus ditegakkan”. Pernyataan ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi etis, tetapi juga sebagai upaya untuk mengingatkan bahwa sistem hukum seharusnya berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

Sementara pada aspek *consequences*, Kompas.com menunjukkan bahwa vonis yang dianggap ringan dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. *Framing* ini mengisyaratkan bahwa jika praktik seperti ini terus berlangsung, maka penegakan hukum terhadap kasus korupsi besar akan kehilangan legitimasi dan tidak memberikan efek jera.

Secara umum, berita ini membingkai keputusan pengadilan dalam kasus Harvey Moeis sebagai sesuatu yang kontroversial dan menuai reaksi keras dari publik, khususnya tokoh elite nasional. Kompas.com menampilkan ketimpangan antara skala kejahatan dan hukuman sebagai inti dari permasalahan, serta menyoroti urgensi moral dalam penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Framing Berita di Tempo.co

Berita pertama berjudul “*Kejaksaan Agung Sebut Korupsi Timah Ilegal Bangka Belitung Rugikan Negara hingga Rp 271 Triliun*” yang dimuat oleh Tempo.co memusatkan perhatian pada skala kerugian negara akibat praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Fokus utama dari pemberitaan ini adalah pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung terkait besarnya kerugian yang ditimbulkan, yang menjadi indikator tingkat keparahan kasus tersebut dalam konteks hukum dan tata kelola negara.

Dalam membangun narasi pemberitaan, Tempo.co menggunakan sejumlah *framing devices*. Salah satu yang paling mencolok adalah *catchphrase* berupa angka “Rp 271 triliun” yang secara eksplisit diletakkan dalam judul. Penggunaan angka yang sangat besar ini bertujuan untuk menggugah perhatian pembaca sekaligus menekankan besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Angka tersebut bukan hanya menjadi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol dampak masif dari korupsi terhadap keuangan negara.

Selain itu, *exemplars* juga hadir dalam bentuk penyampaian fakta konkret mengenai angka kerugian negara. Penjelasan ini memberikan dimensi kuantitatif terhadap kasus, serta mempertegas bahwa korupsi timah tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata dan signifikan.

Dalam aspek *depictions*, Tempo.co menggunakan frasa seperti “*kerugian negara yang sangat besar*”, yang mengandung konotasi negatif dan memperkuat kesan bahwa kasus ini berada di luar kategori tindak pidana biasa. Penggambaran ini dimaksudkan untuk membentuk pemahaman bahwa kasus korupsi ini adalah skandal besar yang mengancam stabilitas tata kelola sumber daya alam nasional.

Sementara itu, dalam *reasoning devices*, berita ini menampilkan elemen

roots dengan menjelaskan akar permasalahan korupsi yang terjadi akibat kolusi antara pejabat BUMN (dalam hal ini PT Timah) dengan pengusaha swasta. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi melibatkan jaringan kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian, berita ini memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menyentuh aspek struktural dan bukan hanya fokus pada pelaku individu.

Untuk *consequences*, Tempo.co menegaskan bahwa kerugian negara sebesar Rp 271 triliun bukan hanya menjadi kerusakan dalam neraca keuangan negara, tetapi juga mencerminkan potensi dampak yang lebih luas, baik terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat lokal. Besarnya angka kerugian tersebut memperkuat *framing* bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai bentuk pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas oleh sistem hukum.

Secara keseluruhan, berita ini membongkar kasus korupsi timah ilegal sebagai skandal besar dalam bidang tata kelola pertambangan yang berkonsekuensi langsung terhadap keuangan negara. Melalui penekanan pada nilai kerugian dan keterlibatan aktor struktural, Tempo.co menyampaikan urgensi penegakan hukum secara tegas dan menyeluruh terhadap pelaku dan jaringan korupsi yang terlibat.

Berita kedua berjudul "*Harvey Moeis Jadi Tersangka ke-16 dalam Kasus Korupsi PT Timah, Ini Perannya*" yang diterbitkan oleh Tempo.co menyoroti perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi PT Timah. Fokus pemberitaan diarahkan pada penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka ke-16, serta uraian rinci mengenai peran signifikan yang ia mainkan dalam jaringan korupsi tersebut. Penambahan tersangka ini memperlihatkan kompleksitas serta skala dari praktik korupsi yang terjadi.

Dalam membangun konstruksi pemberitaannya, Tempo.co memanfaatkan sejumlah *framing devices* untuk

menekankan aspek hukum dan keadilan. *Catchphrase* seperti "*tersangka ke-16*" digunakan untuk menarik perhatian pembaca sekaligus menegaskan bahwa jumlah aktor yang terlibat dalam kasus ini terus bertambah. Frasa ini menyiratkan bahwa kasus korupsi PT Timah bukanlah perbuatan individual, melainkan hasil kolusi yang melibatkan banyak pihak, termasuk kalangan elite bisnis.

Elemen *exemplars* hadir melalui penyajian peran konkret Harvey Moeis dalam skandal ini, dengan menjelaskan secara naratif keterlibatannya dalam proses transaksi maupun pengaruhnya dalam struktur tata kelola yang bermasalah. Detail ini memperkuat narasi bahwa ia tidak hanya menjadi pelaku pasif, tetapi aktor sentral dalam skema korupsi yang sedang diusut.

Pada aspek *depictions*, berita ini menggunakan frasa-frasa konotatif seperti "*peran yang signifikan*" untuk memperkuat gambaran bahwa Harvey Moeis memiliki posisi yang strategis dan menentukan dalam perputaran praktik korupsi di PT Timah. Representasi ini membentuk persepsi bahwa keterlibatannya merupakan faktor kunci dalam terjadinya kerugian negara yang besar.

Sementara itu, dalam *reasoning devices*, Tempo.co menyoroti *roots* dari kasus ini, dengan menjelaskan bahwa praktik korupsi terjadi sebagai akibat dari kolusi antara pengusaha swasta dan pejabat internal BUMN. Ini menggambarkan bahwa masalah yang ada bersifat sistemik, bukan hanya disebabkan oleh pelanggaran individual. Tidak hanya menjadi skandal hukum, kasus ini juga merepresentasikan kegagalan dalam tata kelola institusi negara.

Untuk elemen *appeals to principle*, meskipun tidak ditampilkan secara eksplisit dalam bentuk klaim moral, pemberitaan ini menyiratkan pentingnya penegakan hukum secara konsisten. Semakin bertambahnya jumlah tersangka menunjukkan kebutuhan akan proses hukum yang adil dan menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Dari sisi *consequences*, Tempo.co menegaskan bahwa skandal ini berdampak besar terhadap kerugian negara dan memperburuk citra pengelolaan sumber daya alam nasional. Bertambahnya jumlah tersangka juga mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap tata kelola industri strategis seperti pertambangan timah.

Secara keseluruhan, *framing* yang dilakukan Tempo.co dalam berita ini menampilkan kasus korupsi PT Timah sebagai persoalan hukum yang kompleks dan melibatkan banyak aktor dengan jaringan yang sistemik. Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka ke-16 dibingkai sebagai bentuk progres penegakan hukum, sekaligus menyoroti signifikansi peran-peran strategis dalam konstruksi realitas kasus mega korupsi ini.

Berita ketiga dengan judul "*Harvey Moeis Ungkap Sosok 'Wasit dari Jakarta' di Grup WA New Smelter*" yang diterbitkan oleh Tempo.co membingkai dinamika jaringan kekuasaan dalam kasus korupsi PT Timah melalui pengakuan Harvey Moeis. Istilah "Wasit dari Jakarta" menjadi fokus utama yang menggambarkan bahwa di balik praktik bisnis ilegal ini terdapat sosok sentral yang memiliki peran sebagai pengatur jalannya transaksi dan pengambilan keputusan strategis.

Dalam *framing devices*, berita ini menampilkan *metaphors* dengan menggunakan istilah "Wasit dari Jakarta." Istilah "wasit" secara simbolik menggambarkan figur yang memiliki otoritas tinggi dalam "mengatur permainan," dalam hal ini praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Figur tersebut digambarkan tidak hanya sebagai pengamat, melainkan sebagai penentu keputusan dalam skema korupsi yang terjadi.

Selain itu, istilah "Wasit dari Jakarta" juga berfungsi sebagai *catchphrases* yang ditempatkan secara menonjol dalam judul berita. Frasa ini membangkitkan rasa penasaran publik dan menegaskan adanya aktor besar yang belum tersentuh secara

hukum, tetapi memiliki peran dominan dalam jaringan korupsi.

Dalam elemen *exemplars*, berita menyajikan contoh konkret mengenai keberadaan grup *WhatsApp* "*New Smelter*" yang digunakan sebagai sarana komunikasi di antara para pelaku korupsi, termasuk untuk menyebut atau berdiskusi mengenai figur "wasit." Ini memperlihatkan bagaimana praktik korupsi dilakukan melalui jaringan komunikasi informal namun terstruktur.

Dari aspek *depictions*, berita menggunakan istilah konotatif seperti "wasit dari Jakarta" sebagai simbol kekuatan yang bekerja di balik layar. Istilah tersebut memberikan kesan bahwa kasus korupsi timah ini melibatkan figur elite yang memiliki otoritas besar, sehingga memperluas narasi bahwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang lebih dalam.

Sementara itu, dalam *reasoning devices*, berita menonjolkan *roots* dari permasalahan, yakni adanya kolusi antara pengusaha swasta dan pejabat PT Timah, yang semakin kompleks dengan keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh kuat. Kemunculan figur "wasit" memperkuat pandangan bahwa korupsi dalam kasus ini bukanlah perbuatan individu semata, tetapi merupakan hasil dari relasi kekuasaan yang sistemik.

Dari sisi *consequences*, berita menegaskan bahwa keberadaan aktor utama seperti "wasit" menambah lapisan kompleksitas dalam penanganan kasus. Kerugian negara yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah menjadi implikasi langsung dari sistem korupsi yang terorganisir dan sulit ditelusuri hingga ke akar.

Secara keseluruhan, berita ini membingkai figur "Wasit dari Jakarta" sebagai simbol kekuasaan yang bekerja di balik praktik korupsi PT Timah. Tempo.co membangun narasi bahwa skandal ini melibatkan jaringan elite yang sulit dijangkau oleh proses hukum konvensional, sehingga menekankan pentingnya reformasi tata kelola dan keberanian aparat penegak

hukum dalam menindak semua pihak yang terlibat, termasuk aktor-aktor yang berada di balik layar.

Berita keempat berjudul "*Vonis Ringan Harvey Moeis di Korupsi Timah Dianggap Tak Beri Jera Koruptor*" yang dimuat Tempo.co membingkai putusan pengadilan terhadap Harvey Moeis sebagai bentuk ketidakadilan dan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi. Fokus utama berita ini adalah pada ketidakseimbangan antara beratnya kejahatan dengan ringan hukuman yang dijatuhkan.

Dari segi *framing devices*, Tempo.co menggunakan *catchphrases* seperti "vonis ringan" untuk menggarisbawahi bahwa keputusan hakim dianggap tidak proporsional dengan tingkat kejahatan dan besarnya kerugian negara. Frasa ini juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi kelas kakap.

Berita ini juga menampilkan *exemplars*, yaitu kutipan dari mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, yang menyatakan bahwa putusan terhadap Harvey Moeis tidak memberikan efek jera. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana tokoh yang memiliki otoritas dalam bidang hukum mengkritik putusan tersebut sebagai sesuatu yang kontraproduktif.

Dalam elemen *depictions*, Tempo.co menggambarkan keputusan hakim melalui frasa seperti "tidak memberikan efek jera" dan "tidak mencerminkan keadilan." Penggambaran ini memiliki konotasi negatif yang memperkuat kritik terhadap sistem peradilan, dan menggambarkan bahwa keputusan tersebut melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari sisi *reasoning devices*, berita ini menyebutkan *roots*, yaitu akar penyebab dari kasus korupsi PT Timah, berupa kolusi antara pejabat perusahaan negara dan pihak swasta. Akar masalah ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam kasus ini merupakan bagian dari sistem yang lebih luas dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman ringan.

Dalam *appeals to principle*, berita ini mengedepankan klaim moral seperti "keadilan harus ditegakkan." Klaim ini digunakan sebagai dasar kritik terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, dengan menyiratkan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan substantif dalam kasus korupsi berskala besar.

Adapun dari aspek *consequences*, berita ini menggarisbawahi dampak negatif dari vonis ringan, antara lain potensi tidak adanya efek jera bagi pelaku korupsi lain, serta berisiko memperparah budaya impunitas dalam sektor publik dan swasta. Kerugian negara yang sangat besar akibat kasus ini juga kembali ditekankan sebagai latar belakang penting yang seharusnya menjadi dasar pemberian hukuman berat.

Secara keseluruhan, Tempo.co membingkai putusan pengadilan terhadap Harvey Moeis sebagai bentuk kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan substantif. *Framing* yang digunakan memperkuat narasi bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika pelaku korupsi mendapat hukuman ringan meski menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

Perbedaan Framing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media menekankan proses hukum dari penyidikan hingga vonis, dengan penggunaan perangkat *framing* seperti *catchphrases*, *exemplars*, dan *consequences*.

Kompas.com fokus pada detail proses hukum, seperti penyitaan aset dan penyalahgunaan dana CSR. Kritik terhadap vonis Harvey Moeis juga ditampilkan, misalnya dengan kutipan Mahfud MD yang menyebut vonis tersebut "menusuk rasa keadilan".

Tempo.co lebih menonjolkan besarnya kerugian negara dan sifat sistemik korupsi. Tempo menggunakan metafora seperti "Wasit dari Jakarta" untuk menunjukkan aktor tersembunyi dalam jaringan korupsi. Kritik terhadap vonis ringan juga diperkuat dengan kutipan tokoh

antikorupsi, serta klaim moral bahwa keadilan harus ditegakkan.

Secara umum, Kompas.com menyoroti proses hukum secara formal dan institusional, sedangkan Tempo.co menekankan kompleksitas jaringan korupsi dan kelemahan sistem hukum. Kedua media sama-sama membentuk kesadaran publik akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menghadapi korupsi besar.

Framing Dampak Buruk bagi Lingkungan dan Masyarakat

Framing Kompas.com yang membingkai kasus korupsi PT Timah sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dapat ditemukan dalam dua berita. Berita pertama berjudul "*Dampak Kasus Korupsi, Lebih dari 100 Karyawan Smelter Timah Dirumahkan*". Berita ini menyoroti dimensi sosial dari kasus korupsi, yakni krisis ketenagakerjaan yang muncul akibat terganggunya operasional industri smelter.

Dari aspek *framing devices*, Kompas.com menggunakan *catchphrase* seperti "*lebih dari 100 karyawan dirumahkan*" untuk menegaskan dampak langsung korupsi terhadap masyarakat pekerja. Frasa ini membangun perhatian publik bahwa tindak pidana korupsi memiliki efek berantai yang signifikan di luar ranah hukum semata.

Penggunaan *exemplars* ditampilkan melalui kutipan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Elius Gani, yang mengonfirmasi bahwa banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat berhentinya kegiatan industri. Hal ini memperkuat gambaran konkret terhadap penderitaan yang dialami masyarakat akibat skandal korupsi.

Dari segi *depictions*, istilah seperti "*PHK*" dan "*dirumahkan*" dipilih untuk menggambarkan situasi sulit yang dihadapi para buruh, mempertegas bahwa dampak korupsi menyentuh langsung aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Pada *reasoning devices*, berita ini menampilkan *roots* dengan mengaitkan

krisis tenaga kerja sebagai akibat dari terganggunya sistem operasional perusahaan akibat penyidikan korupsi. Selain itu, *appeals to principle* disampaikan melalui penyampaian kepedulian pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Hal ini mencerminkan dimensi keadilan sosial dalam konteks pemberitaan korupsi.

Adapun *consequences* yang dibingkai mencakup meningkatnya potensi pengangguran dan tekanan sosial-ekonomi yang harus ditanggung oleh para pekerja dan keluarganya. Pemerintah daerah disebut tengah mencari solusi dengan membuka lapangan kerja alternatif sebagai bentuk mitigasi dari kerusakan sistemik yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, berita ini memperluas cakupan *framing* dengan menempatkan korupsi tidak hanya sebagai persoalan legal, tetapi juga sebagai krisis kemanusiaan dan ekonomi lokal. Pendekatan ini mencerminkan perhatian Kompas.com terhadap dimensi sosial dari korupsi, sehingga memperkaya kerangka interpretatif publik dalam memahami dampak konkret dari kejahatan luar biasa ini.

Berita kedua, berjudul "*Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun*" yang dimuat Kompas.com membingkai skandal korupsi PT Timah tidak hanya sebagai pelanggaran hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai tragedi ekologis nasional. Dengan mengangkat dimensi kerusakan lingkungan dan kerugian negara secara simultan, berita ini menempatkan isu korupsi dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan masa depan masyarakat.

Dalam *framing devices*, berita ini menggunakan *catchphrases* seperti "*alam rusak, negara rugi ratusan triliun*", yang langsung membentuk persepsi pembaca terhadap skala besar dari kerusakan yang ditimbulkan. Frasa ini tidak hanya menjadi daya tarik utama, tetapi juga menciptakan kerangka berpikir bahwa korupsi di sektor tambang merupakan bentuk kejahatan luar

biasa yang menuntut perhatian dan respons serius.

Dalam exemplars, Kompas.com menyebut secara spesifik nama-nama tersangka seperti *Harvey Moeis* dan *Helena Lim* sebagai aktor utama dalam praktik korupsi ini. Penyebutan langsung terhadap pelaku memperjelas tanggung jawab individu dan korporasi dalam menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara dan lingkungan.

Dari aspek *depictions*, penggunaan diksi seperti "*rusak*" dan "*rugi*" memiliki konotasi negatif yang kuat, memperkuat citra kehancuran dan kerugian. Hal ini membantu pembaca memahami bahwa dampak kasus ini bukan sesuatu yang abstrak, tetapi nyata dan merusak secara sistemik baik dari sisi ekosistem maupun struktur ekonomi nasional.

Pada *reasoning devices*, berita ini menyoroti *roots* permasalahan, yaitu praktik korupsi dalam tata niaga timah yang melibatkan PT Timah dan perusahaan smelter swasta. Praktik ini menyebabkan eksploitasi alam secara masif dan tidak terkendali, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan negara dari sumber daya yang dikelola secara tidak transparan.

Dalam *appeals to principle*, Kompas.com membingkai kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan ekologis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Korupsi dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebagai tindakan yang mengancam hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Sementara itu, dari sisi *consequences*, berita ini menekankan bahwa kasus ini telah menyebabkan *kerugian finansial negara yang sangat besar dan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan*. Kombinasi antara dampak ekonomi dan ekologi ini menciptakan urgensi bagi negara untuk bertindak tegas, baik melalui penegakan hukum maupun perbaikan tata kelola sumber daya alam.

Secara keseluruhan, Kompas.com membingkai kasus korupsi PT Timah sebagai krisis multidimensi yang menggabungkan aspek hukum, lingkungan, dan ekonomi. Gaya pemberitaan yang berbasis data dan kutipan dari narasumber kredibel memperlihatkan konsistensi Kompas.com dalam membangun narasi bahwa skandal ini bukan hanya peristiwa hukum, tetapi juga bencana ekologi dan ekonomi nasional yang harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh.

Sedangkan Tempo.co hanya menerbitkan satu artikel pada *package* ini, yaitu berita berjudul "*Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung Bikin Hutan Tropis Hilang hingga Korban Jiwa*". Tempo.co membingkai kasus korupsi di sektor pertambangan timah sebagai bencana nasional multidimensi, yang tidak hanya berdampak pada ekonomi negara, tetapi juga membawa kerusakan ekologis yang parah serta korban jiwa di tingkat lokal.

Dari sisi *framing devices*, Tempo.co menggunakan *catchphrases* seperti "*Rugikan Negara Rp 271 Triliun*", yang menjadi penekanan utama untuk menunjukkan skala kerugian akibat praktik tambang ilegal. Angka fantastis ini menjadi pembuka narasi yang memperlihatkan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam berdampak jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran hukum administratif.

Tempo.co juga menampilkan *exemplars* berupa kutipan dari Bambang Hero Saharjo, seorang pakar lingkungan dari IPB, yang menjelaskan bahwa kerusakan hutan tropis dan jatuhnya korban jiwa merupakan konsekuensi nyata dari pengelolaan tambang ilegal yang dibekingi praktik korupsi. Dengan menampilkan suara ahli, berita ini memperkuat kredibilitas analisis dan menunjukkan bahwa dampak tersebut telah melalui telaah ilmiah.

Dalam aspek *depictions*, berita ini mengangkat frasa seperti "*hutan tropis hilang*", "*korban jiwa*", dan "*tenggelm di kolong tambang*", yang membangun citra bencana ekologis yang nyata dan memilukan. Citra ini mendorong pembaca

untuk melihat persoalan korupsi dari sudut pandang kemanusiaan dan lingkungan, bukan semata angka atau nama tersangka.

Pada *reasoning devices*, berita ini menekankan roots dari masalah, yakni korupsi dalam pengelolaan kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang membuka celah munculnya tambang-tambang ilegal. Tempo.co menjelaskan bahwa pembiaran dan kolusi yang melibatkan pejabat serta pengusaha telah menciptakan kondisi di mana kerusakan lingkungan menjadi tak terhindarkan.

Berita ini juga memuat *appeals to principle*, yakni seruan moral untuk menegakkan keadilan ekologis dan melindungi masyarakat dari dampak buruk eksploitasi sumber daya. Tempo.co membingkai kasus ini sebagai bentuk kejahatan yang mengkhianati prinsip keadilan sosial dan lingkungan.

Dari sisi *consequences*, berita ini secara eksplisit menyebutkan dampak

Perbedaan Framing

Kompas.com dan Tempo.co sama-sama menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari kasus korupsi PT Timah, namun dengan fokus *framing* yang berbeda. Kompas.com membingkai kasus ini sebagai masalah sosial-ekonomi, terutama dengan menyoroti nasib para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terhentinya operasional *smelter*. Dalam berita berjudul “*Dampak Kasus Korupsi, Lebih dari 100 Karyawan Smelter Timah Dirumahkan*”, Kompas menggunakan *framing devices* berupa *catchphrases* dan *exemplars* untuk menekankan dampak langsung terhadap para pekerja. Selain itu, dalam berita “*Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun*”, Kompas juga menyebut kerugian negara secara umum, namun tidak menyajikan data rinci terkait kerusakan ekologis atau korban jiwa.

Sementara itu, Tempo.co lebih menonjolkan aspek ekologis dan kemanusiaan dalam membingkai dampak dari korupsi ini. Dalam berita berjudul “*Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Tambang*

lanjutan berupa hilangnya kawasan hutan tropis, meningkatnya korban jiwa akibat kecelakaan tambang, serta krisis sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dalam industri pertambangan bukan hanya berdampak pada sistem keuangan negara, melainkan turut mengancam keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, Tempo.co membingkai kasus ini dalam kerangka tragedi sistemik yang melibatkan pengabaian terhadap regulasi lingkungan, lemahnya pengawasan, dan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek atas kepentingan publik. *Framing* ini membentuk kesadaran bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat luas.

Timah Ilegal di Bangka Belitung Bikin Hutan Tropis Hilang hingga Korban Jiwa”, Tempo menggunakan pendekatan yang mendalam terkait kerusakan lingkungan—seperti hilangnya hutan tropis seluas 460.000 hektare, lubang tambang yang dibiarkan terbuka, hingga jatuhnya korban jiwa. Tempo juga menyoroti kerugian negara secara lebih spesifik, yaitu sebesar Rp 271 triliun, dan menggambarkan keterlibatan jaringan tambang ilegal dalam skandal ini.

Dengan demikian, *framing* yang digunakan oleh Kompas.com lebih menekankan pada sisi sosial-ekonomi, terutama dampaknya terhadap masyarakat pekerja dan kerugian finansial negara. Sementara itu, Tempo.co membingkai kasus ini sebagai krisis lingkungan dan kemanusiaan, dengan menekankan kerusakan ekologis masif dan dampaknya terhadap keselamatan warga. Kedua pendekatan ini menunjukkan perbedaan strategi *framing* media dalam menggambarkan dampak lanjutan dari praktik korupsi besar di sektor sumber daya alam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan kasus korupsi PT Timah tahun 2024 oleh Kompas.com dan Tempo.co memiliki perbedaan dalam strategi *framing* meskipun keduanya sama-sama menekankan bahwa kasus ini merupakan persoalan hukum yang serius. Berdasarkan analisis menggunakan model *framing* Gamson dan Modigliani, ditemukan bahwa kedua media mengonstruksi realitas kasus ini melalui berbagai perangkat *framing* seperti *catchphrases*, *exemplars*, *depictions*, serta *reasoning devices* seperti *roots*, *consequences*, dan *appeals to principle*.

Kompas.com cenderung membingkai kasus korupsi PT Timah sebagai persoalan hukum dan keadilan, dengan penekanan pada proses hukum formal seperti penyitaan aset, penahanan, hingga vonis terhadap para tersangka. Kompas juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi, terutama nasib para pekerja yang terkena PHK akibat terhentinya aktivitas industri timah. Namun, pembedaan terhadap dampak ekologis tampak kurang mendalam.

Sebaliknya, Tempo.co juga kuat dalam membingkai aspek hukum, namun lebih dominan dalam menampilkan kerusakan lingkungan dan dampak kemanusiaan. Tempo secara konsisten mengangkat isu hilangnya hutan tropis, tambang ilegal yang memakan korban jiwa, serta kerugian negara yang rinci dan signifikan. Dalam hal ini, Tempo menggunakan *framing* yang memperluas cakupan persoalan korupsi dari sekadar masalah hukum menjadi krisis tata kelola sumber daya alam yang sistemik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua media sama-sama berperan penting dalam membentuk persepsi publik atas kasus ini, Kompas.com membingkai kasus korupsi PT Timah sebagai isu hukum dan sosial-ekonomi, sementara Tempo.co membingkainya sebagai persoalan hukum yang berdampak ekologis dan kemanusiaan secara luas. Perbedaan *framing* ini mencerminkan identitas redaksional dan pendekatan

jurnalisme masing-masing media, serta memperlihatkan bagaimana media massa turut serta dalam membangun konstruksi realitas atas kasus korupsi di ruang publik.

Daftar Pustaka

- Annur, C.M. (2023, June 15). *Inilah Media yang Paling Dipercaya Warga Indonesia pada 2023, Ada Favoritmu?* Databoks.
- Azizah, F.N. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 6(4), 31-44.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen), 2023-2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dharma, F.A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9.
- Efendi, E, et al. (2023). Teori Agenda Setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715-1718
- Hasan, A.A. (2024, April 1). *Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi*. Tempo.Co.
- Rahmadewi, AT. (2023, September). *Resource Curse: Ketika Korupsi Mengubah Kekayaan Alam Menjadi Kutukan*. Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Hardiantoro, M. N. A. (2024, March 29). *Capai Rp 271 Triliun, Berikut Rincian Penghitungan Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung*. Kompas.Com.
- Tishana, A. (2023). Filsafat Konstruktivisme dalam Mengembangkan Calon Pendidik pada Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Kejuruan. *Journal on Education*, 5(2), 1855-1867.
- Handiyani, K., & Saputro, D. R. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 di Media Online Mojok.Co dan Tirto.Id. *QAULAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 31-44.
- Leliana, I. et al. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBC Indonesia.com. *Jurnal Khatulistiwa*

- Informatika*, 21(1), 60-67,
doi:[10.31294/jc.v21i1.10042](https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042)
- Pratiwi, E. (2021). *Analisis Framing William Gamson dan Andre Modigliani (Mengenai Isu Proses Pengadaan Vaksin Covid-19 di Indonesia pada Program Rosi di Kompas TV dan Indonesia Town Hall di Metro Tv)*. *E-Proceeding of Management*, 8(5).
- Ritonga, R. (2014). *Pertarungan Makna pada Konvensi Partai Demokrat dalam Mencari Calon Presiden Republik Indonesia*. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 30(2), 201-220.
- Ritonga, R., Murwani, E., & Ritonga, S. (2017). *Gender Awareness of Maria Hartiningsih as Kompas Reporter*. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 82-91.
<https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i2.102>
- Siregar, Z. (2018). *Social Construction of Mass Media*. *Wahana Inovasi*, 3(1), 51-58.
- Sitompul, P. (2014). *Konstruksi Realitas Peran KPK dalam Pemberitaan Online terkait Kasus Korupsi (Studi Framing Beberapa Pemberitaan Online Terkait Peran KPK pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah)*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(2), 169-182.
- Walidin, H., Tabrani, Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. UIN Ar-Raniry